FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI

PASAL PERSETUJUAN

TANGGAL 27 NOVEMBER 2013

PASAL PERSETUJUAN
FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI

- (A)** Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea mendirikan Inisiatif Pasar Obligasi Asia (*Asian Bond Markets Initiative*) untuk mengembangkan dan memperkuat mata uang lokal dan pasar obligasi kawasan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan keuangan serta mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional sehingga memungkinkan penggunaan dana negara Asia di dalam kawasan.
- (B)** Sebagai tindak lanjut dari tujuan tersebut, negara-negara ini bersama dengan Bank Pembangunan Asia berkehendak untuk membentuk Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi untuk menyediakan peningkatan kredit dan melakukan investasi yang memperkenankan para emiten yang memenuhi syarat untuk mengakses pasar obligasi mata uang lokal dan dengan demikian menghindari ketidaksesuaian mata uang dan waktu jatuh tempo dengan menerbitkannya di dalam kawasan.
- (C)** Setiap negara, entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh negara ASEAN+3, dan ADB yang tercantum dalam Daftar 1, sesuai dengan Instrumen Penerimaan (secara substansial tercantum dalam Daftar 2) yang diserahkan kepada wali amanat CGIF, telah mengadopsi Pasal Persetujuan berikut, tentang pembentukan dan pengoperasian CGIF. Dalam hal entitas yang sepenuhnya dimiliki negara, yang bersangkutan juga telah memberikan keyakinan yang memadai kepada wali amanat mengenai pengoperasian CGIF.

1. DEFINISI

Kecuali konteksnya mengartikan lain, istilah-istilah yang tercantum dalam Daftar 3 pada Pasal Persetujuan ini memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada Daftar tersebut, dan definisi yang sama juga berlaku pada Pasal Persetujuan ini.

2. TUJUAN DAN FUNGSI CGIF

2.1 Tujuan

Tujuan CGIF adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, dan mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional, dengan mengembangkan pasar obligasi mata uang lokal di kawasan yang dalam dan likuid. Hal ini akan menghasilkan alokasi yang efisien dari dana negara Asia

di dalam kawasan dengan memfasilitasi akses bagi entitas yang memiliki rating peringkat investasi ke pasar obligasi sekaligus mendorong penerbitan surat utang dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang disesuaikan dengan masa proyek investasi.

2.2 Fungsi

Fungsi pengembangan CGIF berikut dilaksanakan berdasarkan ketentuan komersial di dalam negara-negara ASEAN+3:

2.2.1 menjamin obligasi yang berdenominasi dalam mata uang lokal dan diterbitkan oleh entitas yang tergolong dalam Peringkat Investasi dengan sedemikian rupa untuk mengurangi ketidaksesuaian mata uang dan waktu jatuh tempo;

2.2.2 menjamin obligasi yang tidak berdenominasi mata uang lokal yang diterbitkan oleh entitas yang memiliki rating Peringkat Investasi, sepanjang entitas yang bersangkutan secara alami atau secara keuangan telah terlindung nilai dalam mata uang tersebut berdasarkan bisnis utama mereka saat ini;

2.2.3 melakukan investasi untuk pengembangan pasar obligasi; dengan ketentuan tidak ada investasi yang dilakukan sampai dengan Pertemuan Kontributor telah memutuskan bahwa CGIF berada dalam posisi untuk memulai jenis kegiatan tersebut; dan

2.2.4 melakukan kegiatan lainnya dan menyediakan jasa lainnya yang sesuai dengan tujuannya (termasuk pengaturan peringkat kredit pengganti yang tepat untuk Brunei Darussalam dan negara-negara anggota ASEAN baru yaitu Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Uni Myanmar dan Vietnam).

2.3 Larangan Meminjam

CGIF tidak boleh meminjam dari sumber manapun untuk membiayai kegiatannya yang dijelaskan dalam Pasal 2.2 kecuali untuk keperluan pengelolaan kas.

3. PEMBENTUKAN

3.1 Pembentukan

3.1.1 Dewan Direksi ADB telah menyetujui pembentukan CGIF, dan kepengurusannya oleh ADB sebagai Wali Amanat, dalam setiap hal yang berdasarkan Pasal Persetujuan ini. Kegiatan-kegiatan CGIF harus dibiayai sepenuhnya dari dana yang dikontribusikan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini, dan dari properti CGIF lainnya.

3.1.2 ADB dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat wajib:

- (a) memegang amanat semua dana dan properti CGIF lainnya;
- (b) mengelola dan menggunakan dana dan properti CGIF lainnya hanya untuk keperluan-keperluan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini; dan
- (c) berdasar pada ketentuan-ketentuan dari Pasal Persetujuan ini, menunjuk dan memberhentikan semua Staf Eksekutif, staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya.

3.2 Khusus Amanat

Merupakan maksud dari Pasal Persetujuan ini khusus untuk membentuk dan mendefinisikan hubungan perwalian dan penerima manfaat antara Wali Amanat dan setiap Kontributor.

4. MODAL DAN SAHAM

- 4.1 Modal CGIF yang disahkan adalah US\$700.000.000, yang dibagi menjadi 7.000 Saham dengan nilai nominal masing-masing US\$100.000. Semua Saham tersebut harus disetujui dan dibayar sepenuhnya oleh pihak Kontributor.
- 4.2 Modal CGIF yang disahkan dapat ditingkatkan dengan persetujuan dari setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang secara keseluruhan memiliki setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar.
- 4.3 Pemegang setiap Saham memiliki hak-hak sebagai berikut:
  - (a) terkait pemungutan suara: hak untuk mendapatkan pemberitahuan, menghadiri dan memberikan suara sebagai Kontributor dalam setiap Pertemuan Kontributor;
  - (b) terkait pendapatan: hak untuk menerima pendapatan, keuntungan dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal Persetujuan ini; dan
  - (c) terkait modal: hak, bila CGIF terlikuidasi, untuk pembayaran modal kembali sebagaimana diatur dalam Pasal Persetujuan ini.
- 4.4 Setiap Saham yang disetujui oleh Kontributor akan dialokasikan untuk Kontributor tersebut hanya setelah pembayaran penuh diterima oleh Wali Amanat.
- 4.5 Tidak satu pun dari Saham atau modal di CGIF dapat dijanjikan atau dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.

5. PARA KONTRIBUTOR DAN PEMBAYARAN SAHAM

5.1 Para Kontributor

Setiap Kontributor telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau memastikan Pasal Persetujuan ini sesuai dengan prosedur internalnya dengan menyampaikan kepada Wali Amanat, sesuai dengan Pasal 20, Instrumen Penerimaan yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya.

5.2 Pembayaran Saham

5.2.1 Setiap Kontributor wajib menyetujui dan membayar penuh untuk jumlah Saham yang ditetapkan disamping namanya dalam Daftar 1 tidak lebih dari dua tahun setelah Pasal Persetujuan ini berlaku sesuai Pasal 20.

5.2.2 Pembayaran Saham wajib dilakukan dalam dolar AS ke rekening atau rekening-rekening yang akan ditentukan oleh Wali Amanat kepada Kontributor, rekening atau rekening-rekening tersebut akan dibuat oleh Wali Amanat khusus untuk tujuan tersebut.

5.2.3 Pembayaran Saham juga dapat dilakukan oleh entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Kontributor untuk kepentingan dan atas nama Kontributor tersebut.

5.2.4 Kegagalan tiap Kontributor dalam melakukan pembayaran saat jatuh tempo berdasarkan Pasal 5.2 ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Kontributor lainnya untuk melakukan pembayarannya masing-masing.

5.3 Batasan Kewajiban

5.3.1 Kontributor tidak bertanggung jawab, dengan alasan keikutsertaannya dalam CGIF, atas setiap kewajiban CGIF (termasuk kewajiban untuk membayar klaim penjaminan).

5.3.2 Kewajiban dari tiap Kontributor dalam Pasal Persetujuan ini terbatas pada bagian yang belum dibayar dari Saham yang telah disetujui yang telah jatuh tempo dan dapat dibayarkan.

6. BATASAN OPERASIONAL

6.1 Batasan Kewajiban Kontinjensi dan Pertanggung (Leverage)

Besarnya kewajiban kontinjensi yang dapat ditanggung oleh CGIF akan ditetapkan oleh Pertemuan Kontributor sesuai rekomendasi dari Dewan Direksi berdasarkan dukungan suara dari setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang secara keseluruhan memiliki setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar. Namun demikian, bila rasio pertanggung melebihi 2,5:1, kewajiban kontinjensi yang melebihi

2,5 kali jumlah total modal disetor ditambah laba ditahan dikurangi cadangan dan semua investasi tidak lancar yang dimiliki oleh CGIF harus direasuransikan dan CGIF akan mencari reasuransi untuk menutup selisih lebih kewajiban kontinjensi dengan portofolio dalam ukuran yang sesuai untuk pasar reasuransi.

6.2 Kepatuhan terhadap Kebijakan

Kegiatan-kegiatan CGIF wajib dijalankan sesuai dengan Kebijakan Operasional CGIF dan semua Kebijakan Operasional ADB yang berlaku.

7. PERTEMUAN PARA KONTRIBUTOR

7.1 Pertemuan Para Kontributor

7.1.1 Pertemuan Para Kontributor adalah badan pengambil keputusan tertinggi di CGIF.

7.1.2 Kekuasaan khusus dari Pertemuan Para Kontributor termasuk, tidak terbatas pada:

- (a) menentukan tujuan strategis CGIF;
- (b) meninjau kegiatan dan kinerja keuangan CGIF serta memberikan kebijakan umum dan panduan strategis mengenai keseluruhan kegiatan dan pengelolaan CGIF kepada Dewan Direksi dan Ketua Pejabat Eksekutif;
- (c) memilih ketua dan anggota lain dari Dewan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3;
- (d) meninjau dan menyetujui rekomendasi dari Dewan Direksi mengenai seleksi Ketua Pejabat Eksekutif; serta syarat dan ketentuan dari seleksi tersebut;
- (e) meninjau dan menyetujui penunjukkan auditor eksternal serta syarat dan ketentuan dari penunjukkan tersebut atas rekomendasi Dewan Direksi;
- (f) meninjau dan menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun oleh Dewan Direksi;
- (g) meninjau dan menyetujui rekomendasi Dewan Direksi mengenai alokasi laba bersih CGIF pada Tahun Anggaran sebelumnya untuk cadangan dan/atau pembagian tiap kelebihan kepada Para Kontributor;
- (h) meninjau dan menyetujui rekomendasi Dewan Direksi mengenai (i) dimulainya dan cakupan atas kegiatan investasi yang dapat dijalankan CGIF untuk pengembangan pasar obligasi; (ii) penggunaan tingkat pertanggung (leverage) dan keputusan mengenai rasio leverage maksimum; dan (iii) setiap perubahan atas batasan negara dalam kegiatan-kegiatan CGIF sebagaimana diatur dalam Kebijakan Operasional CGIF;
- (i) menentukan penangguhan atau pemberhentian kegiatan-kegiatan CGIF; dan
- (j) mengambil tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Para Kontributor sebagaimana ditentukan dalam Pasal Persetujuan ini.

7.2 Pertemuan Organisasi

- 7.2.1 Wali Amanat wajib menyelenggarakan sebuah Pertemuan Organisasi Para Kontributor dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak tanggal Wali Amanat telah menerima pembayaran untuk setidaknya 80% dari Saham yang disetujui dan disetor sesuai Pasal 4.1.
- 7.2.2 Tanggal, waktu dan tempat Pertemuan Organisasi wajib ditentukan oleh Wali Amanat.
- 7.2.3 Pada Pertemuan Organisasi, Para Kontributor wajib (i) menentukan proses seleksi pengangkatan ketua Pertemuan Para Kontributor; (ii) memilih anggota pertama dari Dewan Direksi, yang telah dicalonkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 8.3, kecuali Ketua Pejabat Eksekutif; (iii) menyetujui perangkat pertama dari Kebijakan-kebijakan Operasional CGIF; (iv) mendelegasikan kewenangan khusus kepada Dewan Direksi sesuai Pasal 10.3.2; (v) menyetujui kerangka acuan awal dan pembentukan masing-masing Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi; dan (vi) mengambil semua tindakan lain yang dianggap perlu bagi CGIF untuk memulai kegiatan. Sepenuhnya untuk tujuan-tujuan Pasal 7.2.3 ini, dan dengan memperhatikan Pasal 4.3(a) dan 4.4, Para Kontributor akan diberikan hak-hak suara secara proporsional sesuai dengan komitmen modal mereka berdasarkan Daftar 1.

7.3 Pertemuan Tahunan Para Kontributor

- 7.3.1 Dalam waktu lima bulan setelah berakhirnya setiap Tahun Anggaran, Pertemuan Tahunan Para Kontributor wajib diselenggarakan pada tanggal dan waktu serta tempat tertentu yang akan ditentukan oleh Para Kontributor.
- 7.3.2 Para Kontributor juga dapat berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan baik:
- (a) melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh Kontributor berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan untuk mendengar satu sama lain; atau
  - (b) dengan alat-alat elektronik lainnya,
- dan Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.

7.4 Pertemuan Khusus

- 7.4.1 Wali Amanat atau Dewan Direksi dapat, dan atas permintaan Para Kontributor yang memiliki setidaknya 10% dari Saham yang beredar wajib, meminta Pertemuan Khusus Para Kontributor pada setiap waktu untuk keperluan apapun sesuai Pasal Persetujuan ini.

7.4.2 Para Kontributor juga dapat berpartisipasi dalam Pertemuan Khusus baik:

- (a) dengan telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan untuk mendengar satu sama lain; atau
- (b) dengan alat-alat elektronik lainnya,

dan Kontributor yang berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.

7.5 Pemberitahuan Pertemuan

7.5.1 Kecuali dibebaskan oleh penerima yang dituju, Wali Amanat atau Dewan Direksi, apabila mungkin terjadi, wajib memberikan kepada setiap Kontributor pemberitahuan pertemuan secara tertulis, agenda pertemuan, dan semua materi terkait setidaknya 30 hari (dalam hal Pertemuan Tahunan) atau 21 hari (dalam hal Pertemuan Khusus) sebelum pelaksanaan pertemuan. Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan tempat, tanggal dan waktu pertemuan serta, dalam hal Pertemuan Khusus, tujuan atas dimintanya Pertemuan Khusus tersebut.

7.5.2 Pemberitahuan tertulis yang dimaksud pada Pasal 7.5.1 meliputi pemberitahuan elektronik seperti surel, faksimili dan bentuk pemberitahuan elektronik lainnya yang umum digunakan.

7.6 Kuorum

Pertemuan Kontributor memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh mayoritas kontributor yang ada yang secara kolektif menguasai mayoritas sederhana dari saham yang beredar.

7.7 Pemungutan Suara

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal Persetujuan ini, setiap keputusan yang diambil dalam Pertemuan Kontributor harus dilakukan oleh Para Kontributor yang hadir pada pertemuan tersebut yang secara kolektif menguasai mayoritas sederhana dari total Saham yang terwakili pada pertemuan dimaksud.

7.8 Tindakan melalui Persetujuan Tertulis Sebagai Pengganti Pertemuan

Kecuali untuk tindakan yang perlu atau diizinkan sesuai Pasal 4.2, 6.1, 15, 17.1, dan 17.2, setiap tindakan yang perlu atau diizinkan untuk diambil pada sebuah Pertemuan Kontributor dapat diambil tanpa ada suatu pertemuan jika persetujuan tertulis, menetapkan tindakan yang dimaksudkan untuk diambil, sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Direksi, telah ditandatangani dalam satu atau lebih salinan (termasuk yang dikirimkan secara elektronik

atau melalui faksimili) oleh setidaknya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara bersama setidaknya dua pertiga total Saham yang beredar.

7.9 Kuasa

Setiap Kontributor yang memiliki hak memberikan suara pada Pertemuan Para Kontributor dapat memberikan suaranya melalui kuasa sepanjang telah menyampaikan surat kuasa tertulis kepada Wali Amanat atau Dewan Direksi, untuk verifikasi sebelum pertemuan dilaksanakan.

8. DEWAN DIREKSI

8.1 Dewan Direksi dan Perannya

8.1.1 Dewan Direksi adalah badan pengambil keputusan tertinggi kedua CGIF.

8.1.2 Dewan Direksi bukan sebuah badan eksekutif. Tugas utama Dewan Direksi adalah untuk:

- (a) mewakili dan melindungi kepentingan Para Kontributor;
- (b) memimpin, mengarahkan dan melakukan pengawasan kebijakan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa:
  - (i) manajemen beroperasi, dan CGIF secara keseluruhan dioperasikan, dengan sepenuhnya sesuai dengan praktik-praktik terbaik internasional, dan dengan fokus untuk meminimalkan risiko yang melekat dalam memberikan penjaminan dan melakukan investasi demi kepentingan terbaik dari Para Kontributor dengan kepatuhan penuh sesuai Pasal Persetujuan ini dan ketentuan lain yang relevan; dan
  - (ii) keputusan strategis dari Pertemuan Para Kontributor diimplementasikan secara penuh dan efisien.

8.1.3 Dewan Direksi bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pertemuan Para Kontributor tentang kegiatan dan kinerja dari manajemen dan CGIF.

8.2 Tanggung Jawab Dewan Direksi

8.2.1 Merupakan tanggung jawab Dewan Direksi untuk meninjau dan memastikan pemenuhan rencana bisnis secara tepat waktu, anggaran dan hal-hal operasional dan keuangan lainnya yang harus dijalankan oleh manajemen; dan untuk menyusun pedoman tentang dan menyetujui keputusan maupun transaksi utama. Tanpa mengesampingkan maksud dari kalimat sebelumnya, tanggung jawab utama Dewan Direksi termasuk, tidak terbatas pada:

- (a) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor pemilihan Ketua Pejabat Eksekutif, dan syarat serta ketentuan dari seleksi tersebut;
- (b) merekomendasikan kepada Wali amanat pengangkatan dan pemberhentian Staff Eksekutif lain;
- (c) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor, dan menunjuk, serta menetapkan syarat dan ketentuan dari perikatan dengan auditor eksternal atas persetujuan dari Pertemuan Para Kontributor;
- (d) meninjau kegiatan operasional dan kinerja keuangan CGIF serta, memberikan arahan umum kepada Ketua Pejabat Eksekutif mengenai tujuan strategis dan isu terkait kegiatan CGIF;
- (e) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor (i) dimulainya dan cakupan dari kegiatan investasi yang dapat dilakukan CGIF untuk tujuan pengembangan pasar obligasi; (ii) penggunaan *leverage* dan ketentuan mengenai rasio *leverage* maksimum; dan (iii) setiap revisi batasan negara dalam kegiatan CGIF sebagaimana diatur dalam Kebijakan Operasional CGIF;
- (f) menyetujui setiap revisi lain atau perubahan terhadap Kebijakan Operasional CGIF;
- (g) meninjau dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Anggaran yang akan datang yang disiapkan oleh Ketua Pejabat Eksekutif;
- (h) menyiapkan Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran sebelumnya untuk ditinjau dan disetujui oleh Pertemuan Para Kontributor;
- (i) merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor alokasi laba bersih CGIF pada Tahun Anggaran sebelumnya untuk cadangan dan/atau pembagian surplus kepada Para Kontributor;
- (j) memastikan bahwa sistem akuntansi, manajemen keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko yang handal dan kebijakan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional (termasuk remunerasi) telah terpasang dan berfungsi secara efektif;
- (k) memastikan bahwa kegiatan CGIF selalu memenuhi Kebijakan Operasional CGIF dan semua Kebijakan Operasional ADB yang sesuai;
- (l) menyetujui seluruh transaksi penjaminan dan investasi;
- (m) memenuhi tugas Wali Amanat yang telah didelegasikan sesuai dengan Pasal 10.3.2;
- (n) mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk kepentingan terbaik CGIF, selain yang merupakan kewenangan dari Pertemuan Para Kontributor dan Wali Amanat, berdasarkan Pasal-Pasal Persetujuan ini; dan
- (o) berkonsultasi kepada dewan penasihat eksternal untuk mendapatkan saran khusus dan profesional yang lengkap untuk membantu memenuhi tanggung jawab Dewan Direksi.

8.3 Komposisi Dewan Direksi

8.3.1 Dewan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh Pertemuan Para Kontributor, terdiri dari delapan anggota, termasuk Ketua Pejabat Eksekutif.

8.3.2 Semua anggota Dewan Direksi wajib memenuhi syarat profesional.

8.3.3 Ketua Dewan Direksi dan ketua dari masing-masing komite Dewan dipilih pada Pertemuan Para Kontributor yang relevan dengan tata cara sebagai berikut:

- (a) untuk Dewan Direksi yang pertama, pada Pertemuan Organisasi;
- (b) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Dewan untuk periode tiga tahun;
- (c) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Audit untuk periode tiga tahun;
- (d) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko untuk periode tiga tahun; dan
- (e) berikutnya, untuk Direktur yang menjadi ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode tiga tahun,

jika salah satu dari ketua Dewan Direksi atau dari komite-komite Dewan mengundurkan diri melalui pemberitahuan kepada Dewan Direksi, atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan alasan apapun, pejabat pengganti sesuai dengan Pasal 8.3.2 wajib dipilih oleh Pertemuan Para Kontributor.

8.3.4 Pejabat, yang adalah Ketua Pejabat Eksekutif:

- (a) merupakan anggota *ex-officio* Dewan Direksi dengan hak suara yang sama dengan Direktur lainnya; dan
- (b) tetap menjadi anggota *ex-officio* Dewan Direksi selama yang bersangkutan menjadi Ketua Pejabat Eksekutif.

8.3.5 Republik Rakyat Tiongkok dan *Japan Bank for International Cooperation* masing-masing berhak untuk mencalonkan dua Direktur. ASEAN (sebagai satu kelompok) dan Republik Korea masing-masing berhak mencalonkan satu Direktur. Atas tiap pencalonan tersebut, semua Kontributor lain dianggap telah setuju. Setiap Direktur dapat berhenti atau diganti setiap saat oleh Kontributor atau kelompok Kontributor yang diwakilinya, dan diganti dengan wakil lain dari Kontributor atau kelompok Kontributor tersebut.

8.3.6 Tanpa memperhatikan ketentuan lain dari Pasal Persetujuan ini, ADB, berhak untuk mencalonkan satu Direktur, yang akan selalu menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Atas pencalonan tersebut, setiap Kontributor dianggap telah menyetujui pemilihan Direktur tersebut. ADB dapat memberhentikan Direktur yang dipilihnya setiap saat mengangkat penggantinya.

8.4 Pertemuan Dewan Direksi

8.4.1 Pertemuan Dewan Direksi dapat diminta oleh ketua atau Wali Amanat, atau atas permintaan setidaknya dua anggota Dewan Direksi, dengan ketentuan telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 14 hari kepada setiap anggota Dewan Direksi menjelaskan masalah yang akan dibahas (bersama dengan semua bahan terkait) beserta tempat, tanggal dan waktu pertemuan.

8.4.2 Dewan Direksi harus melakukan pertemuan, minimal, tiga (3) kali setiap tahun.

8.4.3 Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh anggota Dewan Direksi, satu atau lebih anggota Dewan Direksi juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan dengan cara:

(a) melalui telepon atau fasilitas komunikasi lainnya yang memungkinkan semua anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan untuk mendengar satu sama lain; atau

(b) melalui alat elektronik lainnya,

dan anggota Dewan Direksi yang berpartisipasi dengan cara-cara dimaksud berdasarkan Pasal Persetujuan ini dianggap hadir dalam pertemuan tersebut.

8.4.4 Dalam kondisi tertentu, Direktur yang tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pertemuan Dewan Direksi dapat mencalonkan seseorang untuk bertindak sebagai Direktur pengganti pada pertemuan tersebut, dengan ketentuan pencalonan dimaksud dilakukan secara tertulis sebelum pertemuan Dewan.

8.5 Kuorum

Pertemuan Dewan Direksi memenuhi kuorum untuk memutuskan transaksi bisnis apabila dihadiri oleh mayoritas Direktur yang ada.

8.6 Pemungutan Suara

Semua masalah yang disampaikan kepada Dewan Direksi wajib diputuskan melalui mayoritas sederhana dari pengambilan suara para Direktur yang hadir pada pertemuan atau, dalam hal persetujuan tertulis sebagai pengganti pertemuan sesuai dengan Pasal 8.7, oleh seluruh Direktur, di mana masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara. Dalam hal jumlah suara seimbang atas isu apapun, ketua memiliki tambahan hak satu suara. Tanpa memperhatikan ketentuan lain dalam Pasal Persetujuan ini, setiap masalah yang berkaitan dengan kewenangan yang secara jelas diberikan kepada Wali Amanat wajib memperoleh suara setuju dari Direktur yang mewakili Wali Amanat.

8.7 Tindakan melalui Persetujuan Tertulis Sebagai Pengganti Pertemuan

Tindakan yang diperlukan atau diizinkan untuk dilakukan oleh Dewan Direksi dapat diputuskan tanpa pertemuan jika persetujuan tertulis, dengan menjelaskan tindakan yang

akan dilaksanakan, telah ditandatangani dalam satu atau lebih salinan oleh seluruh anggota Dewan Direksi yang berhak untuk memilih.

8.8 Konflik Kepentingan

Seorang anggota Dewan wajib menyampaikan kepada Dewan Direksi setiap potensi atau terjadinya konflik kepentingan atau kepentingan pihak terkait yang dapat timbul dari suatu proyek, transaksi atau hal lainnya yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan Direksi. Anggota Dewan dimaksud wajib mengecualikan dirinya dari setiap Pertemuan Dewan Direksi di mana hal tersebut sedang dipertimbangkan dan tidak berhak untuk memberikan suara atas hal tersebut.

8.9 Komite-komite Dewan Direksi

Dewan Direksi wajib membentuk komite-komite berikut: Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kerangka acuan awal dari komite-komite ini wajib dipaparkan, sebagai bagian dari Kebijakan Operasional CGIF, untuk memperoleh persetujuan pada Pertemuan Organisasi, dan setiap perubahan berikutnya wajib disetujui oleh Dewan Direksi.

9. KETUA PEJABAT EKSEKUTIF; KOMITE-KOMITE MANAJEMEN

9.1 Peran Ketua Pejabat Eksekutif

- 9.1.1 Kewenangan pengambilan keputusan eksekutif CGIF, dan pengelolaan harian CGIF, dimandatkan dan diberikan kepada Ketua Pejabat Eksekutif, yang wajib melaporkan kepada Dewan Direksi dan terutama kepada para Kontributor.
- 9.1.2 Ketua Pejabat Eksekutif wajib bertindak dalam parameter yang ditetapkan oleh Dewan Direksi atau Pertemuan para Kontributor dari waktu ke waktu.
- 9.1.3 Ketua Pejabat Eksekutif wajib bertanggung jawab untuk, tidak terbatas pada:
  - (a) mengelola kegiatan harian CGIF sesuai dengan Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Direksi;
  - (b) mempersiapkan Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan serta laporan triwulanan tentang kegiatan CGIF untuk ditinjau dan disetujui oleh Dewan Direksi;
  - (c) merekomendasikan kepada Wali Amanat penunjukan dan pemberhentian semua staf profesional dan tenaga ahli lainnya dari CGIF; dan
  - (d) melakukan tindakan lain sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Direksi.

9.2 Penggantian Ketua Pejabat Eksekutif

- 9.2.1 Dewan Direksi dapat menetapkan untuk mengganti Ketua Pejabat Eksekutif (dimana pergantian tersebut wajib disetujui oleh Wali Amanat) dari jabatannya

setiap saat dengan alasan atau jika Dewan mempertimbangkan penggantian tersebut sebagai kepentingan terbaik dari CGIF.

9.2.2 Atas penggantian Ketua Pejabat Eksekutif, atau jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau jika jabatan tersebut kosong, untuk alasan apapun, Dewan Direksi wajib merekomendasikan kepada Pertemuan Para Kontributor seseorang dengan kualifikasi profesional yang diperlukan dan pengalaman terkait yang substansial untuk mengisi lowongan tersebut. Sampai dengan persetujuan penggantian tersebut oleh Pertemuan Para Kontributor, Ketua Pejabat Risiko wajib melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua Pejabat Eksekutif secara interim.

9.3 Komite-komite Manajemen

Akan ada dua komite manajemen pada awalnya: Komite Eksekutif, yang dipimpin oleh Ketua Pejabat Eksekutif; dan Komite Jaminan dan Investasi yang diketuai oleh Ketua Pejabat Risiko. Dewan Direksi wajib menetapkan mandat dan komposisi dari dua komite tersebut.

10. ADMINISTRASI CGIF

10.1 Peran Wali Amanat

Peran Wali Amanat meliputi:

- 10.1.1 menerima Instrumen Penerimaan yang disampaikan oleh Para Kontributor;
- 10.1.2 menerima pembayaran saham oleh Para Kontributor dalam rekening yang dibuka untuk CGIF dan, sampai dengan Pertemuan Organisasi diadakan, menginvestasikan hasil pada instrumen pasar uang jangka pendek sesuai dengan pedoman investasi ADB;
- 10.1.3 setelah Pertemuan Organisasi diadakan, menginvestasikan dana CGIF sesuai dengan instruksi dari Dewan Direksi;
- 10.1.4 mendistribusikan dana CGIF dan properti lainnya sesuai Pasal 14 dan 17;
- 10.1.5 memfasilitasi interaksi antara Para Kontributor, Dewan Direksi dan ADB;
- 10.1.6 menyediakan layanan perbendaharaan dan dukungan administrasi kantor lainnya seperti yang diminta oleh Ketua Pejabat Eksekutif dengan dasar biaya pengganti;
- 10.1.7 membayar setiap biaya atau pengeluaran, termasuk melakukan pembayaran dari dana CGIF dan properti lainnya untuk dirinya sebagai Wali Amanat, atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-Pasal Persetujuan ini;
- 10.1.8 menunjuk (i) Ketua Pejabat Eksekutif yang terpilih pada Pertemuan Para Kontributor, (ii) semua Staf Eksekutif CGIF lain atas rekomendasi Dewan Direksi, dan (iii) semua staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya atas rekomendasi Ketua Pejabat Eksekutif;

- 10.1.9 memberhentikan (i) Ketua Pejabat Eksekutif dan semua Staf Eksekutif CGIF lainnya atas rekomendasi dari Para Dewan Direksi dan (ii) setiap staf professional dan tenaga ahli CGIF lainnya atas rekomendasi Ketua Pejabat Eksekutif; dan
- 10.1.10 memberhentikan setiap Staf Eksekutif atau staf professional dan tenaga ahli CGIF lainnya, setelah berkonsultasi dengan Para Dewan Direksi atau Ketua Pejabat Eksekutif, berturut-turut, yang menurut pendapat Wali Amanat telah melanggar Kebijakan Operasional ADB yang berlaku bagi CGIF atau menyebabkan kerugian reputasi bagi ADB.

10.2 Tugas Wali Amanat

Wali Amanat wajib:

- 10.2.1 menjaga semua dana dan kepemilikan CGIF lainnya dengan baik sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan ini untuk kepentingan para Kontributor;
- 10.2.2 mengelola dan menggunakan dana dan kepemilikan CGIF lainnya hanya untuk tujuan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal Persetujuan ini, secara terpisah dari semua rekening dan aset lainnya dari, atau dikelola, oleh Wali Amanat;
- 10.2.3 mengelola CGIF sesuai dengan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini dan instruksi dari Pertemuan Para Kontributor, dan Dewan Direksi, dan terikat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dari Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia, dan aturan rumah tangga, aturan-aturan, kebijakan, dan keputusannya; dan
- 10.2.4 menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini sebagaimana menjalankan fungsinya sendiri, dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut daripadanya.

10.3 Kekuasaan Wali Amanat; Pendelegasian

- 10.3.1 Wali Amanat memiliki wewenang untuk melakukan seluruh tindakan dan membuat kontrak dan pengaturan-pengaturan yang diperlukan atau diharapkan untuk mencapai tujuan dari CGIF sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal Persetujuan.
- 10.3.2 Dengan pengecualian terhadap kewenangan yang secara tegas dinyatakan oleh Pasal 10.1, Wali Amanat dengan ini mendelegasikan seluruh kekuasaan lainnya di bawah Pasal-Pasal Persetujuan kepada Pertemuan Para Kontributor yang, pada gilirannya, dapat mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada Dewan Direksi, khususnya, kekuasaan untuk:
  - (a) menjalankan kegiatan CGIF dan menjalankan operasinya yang dianggap perlu, tepat atau diinginkan dalam rangka untuk mendukung kepentingan CGIF;
  - (b) membayar setiap biaya-biaya atau pengeluaran yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menjalankan setiap tujuan dari CGIF;

- (c) mempekerjakan atau mengontrak individu atau orang yang dianggap dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan CGIF, dan kemudian untuk mengganti mereka apabila dan saat dipandang tepat;
- (d) terlibat dalam usaha bersama, kemitraan dan gabungan atau persetujuan-persetujuan lainnya;
- (e) mengumpulkan seluruh dana properti lainnya yang menjadi milik CGIF dan membayar seluruh klaim terhadap CGIF;
- (f) terlibat dalam dan untuk menuntut, mempertahankan, melakukan kompromi, mengabaikan, atau menyesuaikan, melalui arbitrase, atau cara lainnya, setiap tindakan, gugatan, penuntutan, perselisihan, klaim dan permintaan terkait dengan CGIF;
- (g) membayar atau memenuhi dengan dana dan properti CGIF lainnya atas setiap permintaan akan jaminan, klaim atau pengeluaran yang digunakan sehubungan dengan jaminan, termasuk litigasi;
- (h) menghentikan setiap tindakan, gugatan, penuntutan, perselisihan, klaim atau permintaan, derivatif atau tindakan lainnya, yang dilakukan oleh setiap orang (termasuk Kontributor atas namanya sendiri atau atas nama CGIF), baik CGIF atau Wali Amanat disebutkan namanya secara individu atau tidak atau hal yang muncul karena alasan bisnis untuk atau atas nama CGIF;
- (i) pembelian dan pembayaran untuk, dari dana CGIF, sepanjang memiliki persyaratan komersial yang wajar, asuransi yang dibutuhkan untuk melindungi Para Direktur, Wali Amanat, ADB, Para Kontributor dan individu atau per-orangan lainnya yang berhak memperoleh penggantian kerugian oleh CGIF;
- (j) menunjuk atau melibatkan satu atau lebih bank atau perusahaan aset keuangan atau institusi keuangan lainnya untuk melayani sebagai agen penyimpanan atas nama CGIF berkenaan dengan dana CGIF yang dapat disimpan dalam rekening penyimpanan; dan
- (k) mendelegasikan lebih lanjut hal di atas kepada Ketua Pejabat Eksekutif, sesuai syarat dan ketentuan yang dapat disetujui, dengan pemberitahuan pendahuluan kepada Wali Amanat.

10.3.3 Wali Amanat tidak bertanggung jawab kepada Para Kontributor atau kepada pihak ketiga manapun untuk tindakan-tindakan dari pihak yang memperoleh pendelegasian kekuasaan ini.

10.3.4 Dalam menafsirkan ketentuan dari Pasal-Pasal Persetujuan ini, praduganya adalah harus mendukung pelimpahan kekuasaan kepada Wali Amanat.

10.3.5 Penjelasan lebih jauh atas kewenangan yang diberikan dalam Pasal Persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan kewenangan tersebut. Kekuasaan Wali Amanat dapat dilakukan tanpa perintah dari atau permintaan untuk setiap pengadilan atau kewenangan lainnya.

10.3.6 Pasal Persetujuan ini, tidak dapat menghalangi ADB untuk bertindak atas namanya sendiri dan dari melakukan kontrak atau transaksi dengan setiap orang, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap Kontributor, setiap penerbit obligasi yang dijamin oleh CGIF, atau setiap sponsor atau investor pendukung dari investasi CGIF dengan hak-hak yang sama sebagaimana jika ADB tidak bertindak sebagai Wali Amanat; dan ADB perlu menyatakan bunga tersebut tidak memperhitungkan setiap keuntungan darinya.

10.4 Perbaikan dan Pembebasan

10.4.1 Terjadinya keterlambatan dalam melaksanakan, atau kegagalan dalam melaksanakan, setiap hak, kewenangan atau perbaikan oleh Wali Amanat atau pihak lainnya berdasarkan Pasal Persetujuan ini, disebabkan oleh kelalaian atau bukan, tidak akan mengurangi hak, kekuasaan dan perbaikan tersebut atau ditafsirkan sebagai pembebasan daripadanya atau persetujuan atas kelalaian tersebut.

10.4.2 Tidak ada tindakan oleh Wali Amanat atau setiap pihak lainnya sehubungan dengan setiap kelalaian, atau setiap persetujuan kelalaian, akan mempengaruhi atau mengganggu setiap hak, kekuasaan dan pertolongan dari Wali Amanat atau setiap pihak lain sehubungan dengan setiap kelalaian lainnya atau berikutnya.

11. LAPORAN

11.1 Laporan Tahunan untuk Kontributor

Tidak lebih dari 30 hari sebelum setiap Pertemuan Tahunan, Dewan Direksi harus memberikan Laporan Tahunan sehubungan dengan Tahun Anggaran sebelumnya kepada Kontributor.

11.2 Laporan kepada Wali Amanat dan Kontributor

Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Tertinggi, harus memberikan semua laporan tersebut kepada Wali Amanat dan Kontributor, dalam bentuk dan detail sedemikian rupa, yang wajar untuk diminta oleh Wali Amanat dan Kontributor dari waktu ke waktu berkenaan dengan operasi dan pengelolaan CGIF.

12. BIAYA DAN PENGELUARAN

Biaya Administrasi; Penggantian Pengeluaran

Wali Amanat berhak menerima biaya administrasi dan penggantian pengeluaran untuk rekeningnya sendiri, termasuk yang berhubungan dengan pemberian jasa perbendaharaan

dan dukungan administrasi kantor lainnya oleh Wali Amanat, sebagaimana yang disetujui oleh Pejabat Eksekutif Tertinggi dari waktu ke waktu.

13. GANTI RUGI

13.1 Ganti rugi kepada Wali Amanat dan ADB

Wali Amanat, ADB, dan setiap orang yang menjadi, atau telah menjadi, petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat, ADB atau CGIF harus diberikan ganti rugi dari dana CGIF dan properti lainnya terkait dengan setiap kerugian, kewajiban, biaya, tagihan, tindakan, permintaan atau pengeluaran yang dikenakan secara layak dan benar oleh pihak penerima ganti rugi dalam bersengketa dan membela salah satu hal diatas atau yang dilakukan terhadap salah satu dari mereka yang timbul dari atau berkenaan dengan operasi CGIF (termasuk, tanpa batasan, setiap tuntutan yang muncul dari tindakan Kontributor atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan Pasal Persetujuan); dengan ketentuan tidak ada orang yang dijamin jika kerugian, kewajiban, biaya, tagihan, tindakan dan permintaan atau pengeluaran akhirnya ditentukan bahwa disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pengeluaran.

13.2 Hak Istimewa dan Kekebalan

Hak istimewa, kekebalan dan pengecualian yang diberikan kepada ADB berdasarkan Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia akan berlaku untuk (i) Wali Amanat, dan (ii) properti, aset, arsip, pendapatan, operasi dan transaksi CGIF. Hak istimewa, kekebalan dan pembebasan yang diberikan kepada ahli yang melakukan misi untuk ADB berdasarkan Persetujuan Pembentukan Bank Pembangunan Asia berlaku juga untuk semua Staf Eksekutif, staf profesional dan tenaga ahli CGIF lainnya yang ditunjuk oleh Wali Amanat. Tidak ada dalam Pasal Persetujuan ini yang akan dianggap sebagai pengabaian hak istimewa, kekebalan dan pengecualian tersebut.

13.3 Tidak Ada Kewajiban Pribadi

13.3.1 Baik Wali Amanat, ADB, setiap Kontributor maupun petugas, karyawan atau agennya tidak akan dikenakan kewajiban pribadi apapun kepada pihak ketiga sehubungan dengan operasi CGIF, dan semua pihak ketiga tersebut hanya akan menuntut pada dana CGIF dan properti CGIF lainnya untuk pemenuhan tuntutan/tagihan sehubungan dengan operasi CGIF. Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha tertulis yang dibuat atau dikeluarkan oleh Wali Amanat atau Staf Eksekutif harus menetapkan bahwa hak pemulihan pihak ketiga terbatas pada aset CGIF, dan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diajukan terhadap Wali Amanat, ADB, setiap Kontributor maupun petugas, karyawan atau agen.

13.3.2 Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau pernyataan kesediaan tertulis yang dibuat atau dikeluarkan oleh Wali Amanat wajib menyatakan bahwa

kontrak, Persetujuan, sertifikat atau pernyataan tersebut tidak dibuat secara pribadi atau dalam kapasitas individu, tetapi sebagai Wali Amanat di bawah Pasal Persetujuan ini, dan bahwa kewajiban CGIF di bawah Persetujuan tersebut tidak mengikat Wali Amanat atau salah satu Kontributor, secara pribadi atau dalam kapasitas individu masing-masing, tetapi mengikat hanya CGIF, dan dapat ditegaskan lebih jauh apabila dianggap perlu oleh Wali Amanat, akan tetapi tidak adanya penegasan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha tersebut dan tidak boleh beroperasi untuk mengikat atau mewajibkan Wali Amanat atau Kontributor pribadi atau dalam kapasitas individu masing-masing.

13.4 Tidak ada Kewajiban untuk Menyelidiki

Kecuali terdapat kekurangan yang nyata dalam kaitannya dengan transaksi, tidak ada individu atau orang yang berurusan dengan Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan mengenai keabsahan transaksi yang akan dibuat oleh Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen atau bertanggung jawab atas penerapan uang atau harta dibayar, dipinjamkan atau dikirim ke atau dari urutan Wali Amanat atau pejabat, karyawan atau agen. Setiap kewajiban, kontrak, Persetujuan, sertifikat atau usaha, dan setiap tindakan lain atau hal apapun yang dieksekusi sehubungan dengan CGIF, harus diduga dengan yakin bahwa telah dieksekusi atau dilakukan oleh pelaksana dalam kapasitas mereka sebagai petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF.

13.5 Ketergantungan kepada Ahli

Setiap petugas dan karyawan CGIF akan, dalam pelaksanaan tugasnya, sepenuhnya dan benar-benar dibenarkan dan dilindungi berkenaan dengan setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak akibat bergantung pada keyakinan baik atas pembukuan atau catatan lain dari CGIF, pada pendapat pengacara, atau pada laporan yang dibuat untuk Ketua Pejabat Eksekutif oleh setiap petugas atau karyawan atau oleh rekeningan, auditor, penilai atau ahli lainnya yang dipilih dengan hati-hati oleh petugas, karyawan atau agen dari Wali Amanat atau CGIF.

14. PEMBAGIAN UNTUK KONTRIBUTOR

14.1 Pembagian

14.1.1 Wali Amanat harus membuka satu atau lebih rekening untuk CGIF untuk menerima pembayaran dari Saham yang dijanjikan oleh Kontributor, dan kemudian mempertahankan rekening tersebut sesuai dengan instruksi dari Dewan Direksi.

14.1.2 Atas penentuan oleh Pertemuan Kontributor mengenai alokasi laba bersih CGIF ini untuk Tahun Anggaran sebelumnya, Wali Amanat wajib

melaksanakan penetapan tersebut dengan mengalokasikan jumlah yang tepat untuk cadangan CGIF. Jika diarahkan pada Pertemuan Kontributor dalam jangka menengah, Wali Amanat juga akan mendistribusikan jumlah surplus yang sesuai untuk masing-masing Kontributor secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka.

14.1.3 Tidak ada Kontributor berhak untuk menerima distribusi dari CGIF kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal Persetujuan ini.

15. PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAU SAHAM KONTRIBUTOR

Tidak ada Kontributor yang dapat memberikan atau mengalihkan bagian dari hak atau kewajiban berdasarkan Pasal Persetujuan ini atau bagian dari Sahamnya atau sebaliknya menarik diri dari CGIF, selain, dalam setiap kasus, dengan suara paling sedikit dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar; dengan ketentuan (i) penyerahan atau pemindahan hanya akan dilakukan kepada negara ASEAN+3 negara atau badan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara ASEAN+3; dan (ii) suara tersebut dapat diberikan pada kondisi dimana Kontributor yang keluar akan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal Persetujuan dan Sahamnya kepada Kontributor lain (dalam proporsi seperti yang ditetapkan dalam suara).

16. TINJAUAN OPERASI CGIF

Setiap 10 tahun periode operasional atau lebih awal, jika perlu, Dewan Direksi mengkaji peran, struktur organisasi dan operasi CGIF untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas operasi CGIF yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil review dan rekomendasi dari Dewan Direksi, Pertemuan Kontributor akan mempertimbangkan dan memutuskan perubahan yang diperlukan terkait peran, struktur organisasi dan operasi CGIF, termasuk penghentiannya, jika dipandang perlu.

17. PEMUTUSAN; PERUBAHAN

17.1 Pemutusan

17.1.1 Apabila disetujui pada Pertemuan Kontributor, berdasarkan suara setuju sedikitnya dua pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total saham yang beredar, untuk mengakhiri operasi CGIF,

(a) Wali Amanat, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Tertinggi tidak akan melakukan bisnis apapun untuk CGIF, kecuali untuk tujuan penutupan urusan;

- (b) Dewan Direksi akan melanjutkan untuk membubarkan urusan CGIF, dengan konsultasi dengan Wali Amanat, dan semua kekuasaan Dewan Direksi di bawah Pasal Persetujuan ini akan berlanjut sampai urusan CGIF akan telah berakhir ; dan
- (c) Setelah membayar atau menyediakan dengan cukup untuk pembayaran semua kewajiban, dan setelah menerima pelepasan, ganti rugi dan pendanaan Persetujuan karena mungkin dianggap perlu untuk perlindungan sendiri oleh Dewan Direksi, Wali Amanat akan membagikan sisa dana CGIF dan kepemilikan lainnya dalam bentuk tunai atau barang, atau kombinasi keduanya, kepada Kontributor dalam proporsi Saham masing masing.

17.1.2 Setiap hak, kepentingan atau hak yang akan dialihkan berdasarkan Pasal 17.1.1 dapat ditetapkan secara tertulis oleh Kontributor yang berhak menerima mereka kepada pihak ketiga, dalam hal ini Dewan Direksi akan berusaha untuk mengalihkan kepentingan, hak atau hak kepada pihak ketiga dengan biaya yang Kontributor berikan pada mereka, tetapi tidak akan bertanggung jawab kepada Kontributor jika tidak mampu melakukannya.

17.2 Prosedur Perubahan

Pasal Persetujuan hanya dapat diubah oleh suara setuju dari sedikitnya dua-pertiga dari jumlah Kontributor yang ada yang memegang secara kolektif setidaknya dua pertiga dari total Saham yang beredar, dengan perubahan tersebut akan efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam pemungutan suara tersebut. Dikecualikan dari ketentuan lainnya dalam Pasal Persetujuan, setiap perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan secara tegas disediakan untuk Wali Amanat harus memerlukan suara setuju dari ADB.

17.3 Jaminan Lebih Lanjut

Atas permintaan dari Wali Amanat, masing-masing Kontributor akan melakukan, melaksanakan, mengakui dan memberikan atau membuat sesuatu selesai, dilaksanakan, diakui atau disampaikan semua tindak lanjut, perbuatan, dokumen, Persetujuan, tugas, transfer, surat penyerahan, surat kuasa dan jaminan yang diperlukan untuk mempengaruhi tujuan dari Pasal Persetujuan ini dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

18. KONFLIK KEPENTINGAN WALI AMANAT

18.1 Untuk menghindari potensi konflik kepentingan antara ADB dan Wali Amanat, dan tanpa melihat ketentuan lainnya dari Artikel Persetujuan ini, Wali Amanat tidak akan memiliki kewajiban untuk mengadili, membela, berkompromi, negosiasi, meninggalkan atau menyesuaikan, melalui arbitrase atau sebaliknya, setiap tindakan, gugatan, lanjutan, sengketa, tuntutan atau permintaan, atau

kelalaian atau potensi kelalaian oleh suatu pihak untuk kontrak yang dieksekusi oleh Wali Amanat atas nama CGIF.

18.2 Jika Wali Amanat menentukan untuk menahan diri dari mengambil tindakan seperti itu, Wali Amanat harus memberitahukan Dewan Direksi dan Kontributor; dan Wali Amanat, Dewan Direksi dan Kontributor akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk berusaha untuk menyetujui pengaturan yang memuaskan untuk menangani sengketa tersebut termasuk penyerahan dan pengalihan semua atau bagian dari hak dan kewajiban Wali Amanat di bawah jaminan yang relevan atau investasi untuk Para Kontributor, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka.

18.3 Wali Amanat tidak memiliki tanggung jawab kepada Kontributor sebagai akibat dari ketetapan Wali Amanat untuk menahan diri dari mengambil tindakan seperti dalam hal sengketa atau sebagai akibat dari kegagalan Wali Amanat dan Kontributor mencapai pengaturan yang memuaskan secara tepat waktu atau sebaliknya.

19. ARBITRASE

Setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan dari atau terkait dengan Pasal Persetujuan ini, atau pelanggaran atau penghentian atau cacat daripadanya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara pihak-pihak, akan diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu. Otoritas penunjukan adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Tetap Arbitrase. Jumlah arbiter harus tiga orang. Tempat arbitrase harus di *The Hague*. Hukum yang akan diterapkan oleh arbiter harus hukum internasional publik. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase harus bahasa Inggris.

20. MULAI BERLAKU

Pasal Persetujuan ini akan berlaku ketika Instrumen Penerimaan ditandatangani oleh Republik Rakyat Tiongkok, *Japan Bank for International Cooperation*, Republik Korea, ADB, dan lima atau lebih negara ASEAN telah disimpan dengan Wali Amanat di alamat yang ditentukan di bawah:

Bank Pembangunan Asia
6 ADB Avenue
Mandaluyong City
1550 Metro Manila
Philippines

Wali Amanat harus segera melaporkan kepada semua Kontributor ketika Instrumen Penerimaan telah diterima sepatutnya.

**DAFTAR 1
KONTRIBUTOR DAN PEMBAYARAN SAHAM**

Kontributor	Saham	Jumlah (US\$)
Bank Pembangunan Asia	1300	130,000,000
Brunei Darussalam	56	5,600,000
Kamboja	1	100,000
Republik Rakyat Tiongkok	2000	200,000,000
Indonesia	126	12,600,000
Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional	2000	200,000,000
Republik Korea	1000	100,000,000
Laos	1	100,000
Malaysia	126	12,600,000
Myanmar	1	100,000
Filipina	126	12,600,000
Singapura	126	12,600,000
Thailand	126	12,600,000
Vietnam	11	1,100,000
Total	7000	700,000,000

DAFTAR 2
INSTRUMEN PENERIMAAN PASAL PERSETUJUAN DARI
FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI

Tanggal: [   ]

[Nama dari negara ASEAN+3]/[ADB] dengan ini memberitahu kepada Wali Amanat CGIF bahwa:

- (1) akan berpartisipasi dalam CGIF;
- (2) menerima Pasal Persetujuan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam Pasal Persetujuan;
- (3) melakukan pembayaran dengan jumlah US\$ [   ] oleh [   ] sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan; dan
- (4) menyetujui kegiatan CGIF sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan di wilayah [_____]

Pembayaran dilakukan [institusi yang melakukan pembayaran] kepada rekening yang tercantum di bawah ini:

Bank:	[ ]
SWIFT:	[ ]
Nama Rekening:	[ ]
Nomor Rekening:	[ ]

Untuk dan atas nama

[Nama negara ASEAN+3]/[ADB]

_____

Nama: [   ]

Jabatan:[   ]

Kementerian/Kantor: [   ]

DAFTAR 3

DEFINISI

“**ADB**” adalah Bank Pembangunan Asia

“**Kebijakan Operasional ADB**” adalah segala aturan ADB yang diterapkan pada kegiatan ADB dari waktu ke waktu, termasuk Ketentuan mengenai Anti Korupsi (1998), Ketentuan mengenai Pemberantasan Pencucian Uang dan Terorisme di Bidang Keuangan (2003), dan Ketentuan mengenai Laporan Usaha Penjaminan (2009);

“**ASEAN**” adalah Asosiasi Bangsa-bangsa di Asia Tenggara terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam;

“**ASEAN+3**” adalah ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, Jepang dan Republik Korea;

“**Anggaran Tahunan**” adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, anggaran tahunan untuk Tahun Fiskal yang telah disusun oleh Ketua Pejabat Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Direksi;

“**Rencana Kegiatan Tahunan**” adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, rencana kegiatan tahunan untuk Tahun Fiskal yang telah disusun oleh Ketua Pejabat Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Direksi;

“**Pertemuan Tahunan**” adalah pertemuan Para Kontributor sesuai dengan Pasal 7.3;

“**Laporan Tahunan**” adalah, sesuai dengan Tahun Fiskal, laporan komprehensif yang telah disiapkan oleh Dewan Direktur mengenai kegiatan operasional CGIF, pendanaan dan aktifitas untuk setiap Tahun Fiskal untuk disetujui dalam Pertemuan Tahunan yang meliputi:

- (a) laporan Ketua Dewan Direktur;
- (b) laporan Ketua Pejabat Eksekutif;
- (c) laporan Komite Audit, Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
- (d) laporan auditor eksternal (meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal)

“**Komite Audit**” adalah komite dalam struktur Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 yang disetujui oleh Para Kontributor pada Pertemuan Organisasi;

“**Dewan Direksi**” atau “**Dewan**” adalah Dewan Direksi dari CGIF sesuai Pasal 8;

“**CGIF**” adalah Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi;

“**Kebijakan Operasional CGIF**” adalah (i) kerangka acuan dari Dewan dan komite-komitennya, dan (ii) seluruh kebijakan keuangan dan kebijakan bisnis dari CGIF termasuk kebijakan mengenai akuntansi, manajemen keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko dan sumber daya manusia;

“**Ketua Pejabat Eksekutif**” adalah ketua pejabat eksekutif CGIF yang ditunjuk oleh Wali Amanat melalui seleksi pada Pertemuan Para Kontributor;

“**Ketua Pejabat Risiko**” adalah ketua pejabat risiko CGIF yang ditunjuk oleh Wali Amanat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Direksi;

“**Kontributor**” adalah negara dalam kawasan ASEAN+3, entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, atau ADB, sebagaimana tercantum dalam Daftar 1 Pasal Persetujuan;

“**Direktur**” adalah anggota Dewan Direksi dari CGIF;

“**Komite Eksekutif**” adalah komite manajemen yang dibentuk sesuai dengan pasal 9.3 yang akan memberikan arahan kepada Ketua Pejabat Eksekutif untuk seluruh kegiatan non rutin (selain pengajuan penjaminan dan investasi yang spesifik) dalam pertimbangan dari CGIF;

“**Pejabat Eksekutif**” adalah Ketua Pejabat Eksekutif, Ketua Pejabat Risiko, dan seluruh anggota Komite Eksekutif yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi, termasuk wakil presiden kegiatan operasional, ketua pejabat keuangan dan penasihat umum;

“**Tahun Fiskal**” adalah tahun fiskal CGIF, yang periodenya dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun kalendar;

“**Komite Penjaminan dan Investasi**” adalah komite manajemen yang dibentuk sesuai Pasal 9.3 yang akan melakukan penilaian atas seluruh pengajuan penjaminan dan investasi untuk memastikan bahwa pengajuan tersebut dapat diterima sesuai dengan parameter risiko sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Direksi;

“**Instrumen Penerimaan**” adalah instrumen penerimaan sebagaimana tercantum pada Daftar 2 Pasal Persetujuan ini;

“**Komite Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**” adalah komite pada Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 dan disetujui oleh Para Kontributor dalam Pertemuan Organisasi;

“**Peringkat Investasi**” adalah, minimal, peringkat investasi yang diberikan suatu entitas pada negara ASEAN+3 yaitu (i) lembaga pemeringkat investasi lokal, atau (ii) lembaga pengganti pemeringkat investasi yang dijalankan CGIF apabila tidak tersedia lembaga pemeringkat investasi lokal;

“Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional” adalah Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional merupakan bagian dari Kerja Sama Keuangan Jepang;

“Pertemuan Para Kontributor” adalah Pertemuan Organisasi, Pertemuan Tahunan dan Pertemuan Khusus;

“Komite Nominasi dan Remunerasi” adalah komite pada Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 8.9 dan disetujui oleh Para Kontributor dalam Pertemuan Organisasi;

“Pertemuan Organisasi” adalah pertemuan pertama Para Kontributor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 7.2;

“Saham” adalah saham sebagai bagian permodalan CGIF dengan jumlah yang tercantum pada Pasal 4.1 dan dengan hak-hak sebagaimana tercantum pada Pasal 4.3;

“Pertemuan Khusus” adalah pertemuan Para Kontributor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 7.4;

“Wali Amanat” adalah peran ADB tidak dalam kapasitasnya sebagai individual atau personal tetapi dalam kapasitasnya sebagai wali amanat CGIF sesuai dengan Pasal Persetujuan ini dan untuk tujuan yang telah tercantum pada Pasal Persetujuan; dan

“UNICITRAL” adalah Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional.

DAFTAR 2
INSTRUMEN PENERIMAAN PASAL PERSETUJUAN DARI
FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI

Tanggal: [   ]

Republik Indonesia dengan ini memberitahu kepada Wali Amanat CGIF bahwa:

- (1) Kami kan berpartisipasi dalam CGIF;
- (2) Kami menerima Pasal Persetujuan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam Pasal Persetujuan;
- (3) Kami akan melakukan pembayaran dengan jumlah US\$ 12.6 juta pada Juli 2011 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan; dan
- (4) Kami menyetujui kegiatan CGIF sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Persetujuan di wilayah Republik Indonesia.

Pembayaran dilakukan kepada rekening yang tercantum di bawah ini:

Bank:	Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT:	BKTRUS33
Nama Rekening:	04-446-413
Nomor Rekening:	ADB-Credit Guarantee and Investment Facility

Untuk dan atas nama
Republik Indonesia

Agus D.W. Martowardjojo
Menteri Keuangan

Gedung Djuanda I Lantai 3
Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat